

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA
PELAKSANAAN SANKSI DENDA, PELAYANAN
FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di
Kota Semarang)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi**



**Nama : Agus Nugroho Jatmiko
N I M : C4C002193**

**Kepada
Program Studi Magister Akuntansi
Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro
Tahun 2006**



SERTIFIKASI

Saya, *Agus Nugroho Jatmiko*, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Akuntansi ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Agus Nugroho Jatmiko

9 Oktober 2006

Tesis Berjudul

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA PELAKSANAAN SANKSI
DENDA, PELAYANAN FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Agus Nugroho Jatmiko

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 9 Oktober 2006 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt.

Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt.

Anggota Tim Penguji

Dr. Abdul Rohman, M.Si., Akt.

Dr. M. Syafruddin, M.Si., Akt.

Drs. Rahardja, M.Si., Akt.

Semarang, 9 Oktober 2006

Universitas Diponegoro
Program Pasca Sarjana
Program Studi Magister Sains Akuntansi
Ketua Program.

Dr. M. Nasir, M.Si., Akt.

ABSTRACT

Although sum of tax payers increased year to year, there are many obstacle which can be a burden in order to enhance tax ratio, one of them are tax compliance. Unfortunately, researchs which have been done tend to scrutinize tax compliance of Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). This research study tax compliance rate of tax payer in city of Semarang by using several variables which have been used in some previous research such as attitude toward fine sanction, attitude toward service of fiscus and attitude toward tax awareness. These variables chose because fitter to personal tax payer rather than Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) payer. The aims of this study is to analyse the impact of attitude toward fine sanction, attitude toward service of fiscus and attitude toward tax awareness on tax compliance.

Population in this study are personal tax payers in city of Semarang. Based on data which obtained through KPP in Semarang, there were 29.006 effective personal tax payers in city of Semarang until year of 2003. To save time and cost, not all of those population became object in this study. Proportional sampling used to obtain sample. 100 sample was chose. Primary data collection method in this study is questionnaire. Multiple regression technique used to analyse data.

Results show that attitude toward fine sanction, attitude toward service of fiscus and attitude toward tax awareness have a positive and significant impact toward tax compliance.

Keywords : Tax compliance, attitude toward fine sanction, attitude toward service of fiscus and attitude toward tax awareness.

ABSTRAKSI

Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Namun kebanyakan penelitian yang telah dilakukan cenderung hanya meneliti kepatuhan wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan saja (PBB). Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan pada kepatuhan WP.

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di kota Semarang. Berdasarkan data dari KPP yang ada di kota Semarang, hingga akhir tahun 2003 tercatat sebanyak 29.006 WP OP yang merupakan WP OP efektif. Tidak semua WP OP efektif ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *proportional sampling*. Jumlah sampel ditentukan 100 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak pada sanksi denda, sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya tesis yang berjudul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian baik langsung maupun tidak langsung, antara lain :

1. Drs. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt. sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan masukan dan bimbingan hingga selesainya tesis ini.
2. DR. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt. yang telah memberikan bimbingan dan perhatian sungguh-sungguh sejak awal penulisan tesis ini hingga selesai.
3. Pengelola Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro dan semua dosen Universitas Diponegoro, terutama pengampu mata kuliah di Program Magister Sains Akuntansi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan dukungan selama masa kuliah maupun dalam penyusunan tesis ini.
4. Anggota Dewan Penguji DR. Abdul Rohman, M.Si., Akt., DR. M. Syafruddin, M.Si., Akt. Drs. Rahardja, M.Si., Akt.

5. Segenap staf admisi pengelola Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
6. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan VII (sore) yang telah memberikan bantuan, dukungan dan kerjasamanya selama kuliah, semoga silaturahmi tetap terjaga.
7. Ibunda tercinta Muryatinah Mulyono, kakak, adik dan Keluarga Besar Soepratomo Khadam yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis baik dalam suka maupun duka.
8. Teristimewa buat istriku tercinta Hatmi Handyaningsih yang sedang mengandung anak kami yang kedua dan anakku Nafezza Ajeng Danishara yang senantiasa sabar dan setia mendampingi serta memberi dukungan moril yang tiada ternilai, untuk dan karena merekalah sebenarnya tesis ini harus segera selesai.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, yang turut memberikan bantuan dalam menyelesaikan kasus ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan. Akhir kata, teriring harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna.

Semarang, Oktober 2006

Agus Nugroho Jatmiko

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	I
SERTIFIKASI	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
ABSTRACT	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka.....	12
2.1.1. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>).....	12
2.1.2. Teori Pembelajaran Sosial (<i>Social Learning Theory</i>).....	14
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.1.4. Sikap Wajib Pajak.....	17
2.1.4.1. Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda.....	19
2.1.4.2. Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus.....	20
2.1.4.3. Sikap Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Perpajakan.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu.....	23
2.2.1. Penelitian Terdahulu.....	23
2.2.2. Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu.....	28
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	29
2.4. Hipotesis.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data.....	33
3.2. Populasi dan Sampel.....	35
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	37
3.4. Teknik Analisis.....	40
3.4.1. Asumsi Klasik.....	41
3.4.1.1. Uji Normalitas Data.....	42

3.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas.....	42
3.4.1.3. Uji Multikolinieritas.....	43
3.4.2. Pengujian Hipotesis.....	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Responden.....	45
4.2. Statistika Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian.....	47
4.3. Uji Reliabilitas dan Validitas.....	50
4.4. Analisis Data.....	51
4.4.1. Pengujian Asumsi Klasik.....	51
4.4.1.1. Uji Normalitas Data.....	52
4.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas.....	53
4.4.1.3. Uji Multikolinieritas.....	54
4.4.2. Pengujian Hipotesis.....	56
4.4.2.1. Pembahasan Hipotesis 1.....	57
4.4.2.2. Pembahasan Hipotesis 2.....	60
4.4.2.3. Pembahasan Hipotesis 3.....	64
4.4.3. Pengujian Kelayakan Model.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	69

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1. Peran Sumber Penerimaan Pajak Dalam APBN.....	2
1.2. <i>Tax Ratio</i> Tahun 1999-2003.....	3
1.3. Perkembangan Wajib Pajak Dari Tahun 1991 Hingga 2002.....	4
1.4. Tingkat Kepatuhan WP OP di Kota Semarang Tahun 1999 Hingga 2003.....	5
2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	26
3.1. Perhitungan Pengambilan Sampel Untuk Setiap KPP.....	37
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	39
4.1. Demografi Responden.....	46
4.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	47
4.3. Ringkasan Hasil Perhitungan Reliabilitas dan Validitas.....	51
4.4. Hasil Uji Glejser.....	54
4.5. Hasil Uji Multikolinieritas.....	55
4.6. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	57
4.7. Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Sanksi.....	59
4.8. Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Fiskus.....	62
4.9. Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Sadar.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1.	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	30
4.1.	Histogram <i>Standardized Residual</i>	52
4.2.	PP Plot <i>Standized Residual</i>	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Data Untuk Uji Reliabilitas dan Validitas
- Lampiran 3. Output Reliabilitas dan Validitas
- Lampiran 4. Data Penelitian
- Lampiran 5. Data Yang Digunakan Untuk Analisis Regresi
- Lampiran 6. Output Statistika Deskriptif
- Lampiran 7. Output Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 8. Output Analisis Regresi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri . Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (M. Said, 2003).

Penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal, oleh karena itu satu-satunya andalan pemerintah dewasa ini adalah penerimaan dari sektor perpajakan Kiryanto (2000).

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Dari data APBN 1981/82 sampai dengan tahun 2003, perkembangan peranan pajak dalam APBN sangat fenomenal. APBN yang sejak tahun 1981/82 lebih bertumpu pada penerimaan sektor migas dan bantuan proyek makin bergeser pada

penerimaan pajak di tahun anggaran tahun 1991/92 dan seterusnya hingga sampai dengan data tahun 2003 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1.

Peran Sumber Penerimaan Pajak Dalam APBN

Tahun	Peran Pajak dan Cukai	Peran Penerimaan Bukan Pajak	Peran Penerimaan Migas	Penerimaan Pembangunan	Total APBN (Trilyun)
1980/81	24,67%	2,69%	59,89%	12,74%	11.720,8
1981/82	23,33%	2,42%	61,97%	12,28%	13.921,6
1985/86	28,99%	6,53%	48,82%	15,65%	22.825,4
1986/87	34,92%	9,85%	28,95%	26,27%	21.892,8
1990/91	39,88%	4,28%	35,82%	20,03%	49.451,0
1991/92	46,27%	4,78%	28,92%	20,02%	51.993,9
1995/96	58,23%	10,02%	17,95%	13,50%	82.727,8
1996/97	58,26%	9,48%	20,73%	11,53%	95.840,2
2001	61,61%	1,59%	27,31%	9,49%	299.851,2
2002	70,38%	1,29%	21,05%	7,28%	304.182,4
2003	71,60%	4,73%	14,97%	8,70%	336.155,5

Sumber : Berita Pajak No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003.

Dari Tabel 1. di atas maka dapat dilihat bahwa trend yang terjadi pada tahun 1980an adalah bahwa titik berat penghasilan negara bukan di peranan pajak, namun lebih bertumpu pada penerimaan migas dan bantuan proyek yakni dana pinjaman dan hibah dari luar negeri. Fenomena ini terjadi karena pada tahun tersebut secara teknis lebih mudah memperbesar produksi sektor migas dan menerima bantuan luar negeri. Kondisi ini secara teoritis sangat rentan terhadap kelanjutan sumber-sumber penerimaan negara (M. Said, 2003). Kerentanan tersebut terjadi karena sektor migas merupakan sektor yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan makin lama cadangan migas akan

makin menipis, lebih lanjut sumber penerimaan dari bantuan luar negeri di masa mendatang harus dibayar kembali.

Pada tahun 1990 an hingga berdasarkan data tahun 2003, terlihat bahwa titik tumpu dari penerimaan negara bergeser kepada penerimaan pajak. Bahkan peranan pajak makin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah sangat menitikberatkan peranan pajak dalam membiayai APBN, hal ini ditandai dengan makin meningkatnya target penerimaan pajak oleh Dirjen Pajak. Namun sayangnya terdapat kendala yang terjadi dalam memenuhi target penerimaan pajak oleh Dirjen Pajak (DJP) tersebut. Kendala tersebut adalah berupa *tax ratio* (merupakan jumlah pajak yang berhasil dipungut dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto) yang rendah.

Berdasarkan data yang ada *tax ratio* Indonesia baru mencapai 13,03% (sumber : Berita Pajak No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003). Nilai *tax ratio* ini masih dapat ditingkatkan, karena selama beberapa tahun terakhir ini jumlah wajib pajak senantiasa bertambah. Meskipun demikian tetap ada kendala dalam upaya meningkatkan *tax ratio*. Pada Tabel 1.2. dan Tabel 1.3. berikut ini dapat dilihat *tax ratio* dan perkembangan wajib pajak dari tahun 1991 hingga 2002.

Tabel. 1.2.

Tax Ratio Tahun 1999 – 2003

Tahun	<i>Tax Ratio</i> (Dalam Persen)
1999	12,29
2000	10.16
2001	11.72
2002	12.61
2003	13.03

Sumber : Berita Pajak No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003.

Tabel 1.3.**Perkembangan Wajib Pajak Dari Tahun 1991 Hingga 2002**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1991	1.250.526
1992	1.343.476
1993	1.447.185
1994	1.567.792
1995	1.692.426
1996	1.620.836
1997	1.941.860
1998	2.031.496
1999	2.154.643
2000	2.309.741
2001	2.711.250
2002	2.809.394

Sumber : Berita Pajak No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003.

Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Solich Jamin (2001) secara langsung menyatakan bahwa perlu peningkatan kepatuhan pajak guna meningkatkan *tax ratio*. Berdasarkan penelitian Solich Jamin (2001) juga diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) dan wajib pajak orang pribadi (WP OP) ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat terjadi karena WP badan lebih cenderung menggunakan konsultan pajak bahkan mempekerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan, berbeda dengan WP OP yang cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya.

Di kota Semarang secara khusus, hingga tahun 2003 terdapat sebanyak 30.519 wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdaftar dan sebanyak 29.006

WP OP yang efektif. Namun 18.701 WP OP yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang hanya 64,47%. Berdasarkan data yang ada pula dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Pada Tabel 1.4. berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang dari tahun 1999 hingga 2003.

Tabel 1.4.

Tingkat Kepatuhan WP OP di Kota Semarang Tahun 1999 Hingga 2003

No.	SPT Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	WP Yang Menyampaikan SPT	% Kepatuhan
1.	1999	17.142	15.640	12.074	77,19%
2.	2000	19.112	17.600	12.513	71,09%
3.	2001	21.679	20.166	13.248	65,69%
4.	2002	24.774	23.261	15.210	65,38%
5.	2003	30.519	29.006	18.701	64,47%

Sumber : KPL. KPP.9.7.

Berdasarkan Tabel 1.4. di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 1999 hingga tahun 2003, tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang senantiasa menurun. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti. Solich Jamin (2001) meneliti mengenai perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak (gabungan WP Badan dan WP OP) yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Hasil

penelitian Solich Jamin adalah bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang signifikan antara periode sebelum krisis ekonomi dan periode sesudah krisis ekonomi. B.M. Sitorus (2003) juga melakukan penelitian yang relatif serupa dengan penelitian Solich Jamin, hanya saja B.M. Sitorus (2003) secara khusus melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak badan pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi pada WP badan pada KPP Jakarta Mampang Prapatan. Penelitian B.M. Sitorus dilakukan dengan melakukan uji beda pada kedua periode tersebut. Hasil penelitiannya adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi.

Kiryanto (2000) secara khusus melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan WP Badan di DIY. Penelitian Kiryanto (2000) dilakukan dengan menggunakan variabel bebas lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. Hasil penelitian Kiryanto (2000) adalah bahwa lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suhardito (1996) berupaya untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya. Hasil penelitian Bambang Suhardito (1996) adalah bahwa faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak seperti kesadaran bernegara, pemahaman WP tentang UU, persepsi penghindaran pajak, persepsi tentang beban PBB dan status rumah WP tidak berpengaruh signifikan. Fratnesi (2001) juga melakukan penelitian yang relatif sama dengan Bambang Suhardito

(1996) dengan obyek penelitian di kota Bengkulu. Terdapat beberapa faktor yang tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB yaitu lama tinggal WP, pendapat WP tentang beban PBB dan rasio *permanent difference*.

Sulud Kahono (2003) melakukan penelitian dengan kepatuhan wajib pajak PBB sebagai variabel terikat. Variabel bebas yang digunakannya adalah sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap penghindaran PBB. Hasil penelitian Sulud Kahono (2003) tersebut adalah variabel bebas yang digunakan baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PBB.

Hampir sama dengan penelitian Sulud Kahono (2003), Suyatmin (2004) juga menggunakan beberapa variabel yang sama yaitu sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, dan sikap WP terhadap pelayanan fiskus. Suyatmin (2004) menggunakan pula variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan sebagai variabel bebas. Hasil penelitian Suyatmin (2004) juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP PBB.

Dari uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang telah ada cenderung melakukan uji beda kepatuhan WP sebelum dan sesudah krisis ekonomi (misalnya penelitian Solich Jamin, 2001 dan B.M. Sitorus), secara khusus mengkaji kepatuhan WP Badan (misalnya penelitian Kiryanto, 2000) dan mengkaji WP PBB

(misalnya penelitian Bambang Suhardito, 1996; Fratnesi, 2001; Sulud Kahono, 2003; Suyatmin, 2004). Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP), padahal data yang ada (Tabel 1.4.) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP terutama di kota Semarang cenderung menurun tahun demi tahun.

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di Semarang karena berdasarkan data dari KPP di kota Semarang (KPL.KPP.9.7.) diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak menurun dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB. Sebagai contoh sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah dipandang kurang relevan untuk digunakan dalam penelitian WP OP karena pajak (bukan PBB) dari WP OP maupun WP Badan dikelola langsung oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah sebagaimana PBB. Variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara lebih bersifat umum, dan secara khusus hal tersebut dapat dicerminkan oleh kesadaran wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di kota Semarang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP OP di kota Semarang sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah “faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan WP OP di kota Semarang?”.

Sementara itu beberapa penelitian yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung mengkaji WP Badan maupun WP PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan penelitian yang membutuhkan penelitian yang secara khusus mengkaji WP OP.

Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan WP OP adalah sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB (Sulud Kahono, 2003 dan Suyatmin, 2004).

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sikap wajib pajak pada sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh dari sikap wajib pajak pada sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh dari sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP).
2. Bagi KPP secara umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan WP OP yang dilayaninya.
3. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris

dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)
2. konsensus
3. konsistensi

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama.

Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Kiryanto (2000).

Kiryanto (2000) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan di DIY. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Variabel bebas yang digunakan adalah lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kepatuhan WP. Hasil penelitian Kiryanto (2000) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP.

2.1.2. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996). Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner (1971) yaitu teori yang mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya.

Menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

1. proses perhatian (*attentional*)
2. proses penahanan (*retention*)
3. proses reproduksi motorik
4. proses penguatan (*reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah

model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Contoh penelitian yang menggunakan basis teori pembelajaran sosial ini adalah penelitian Bambang Suhardito (1996).

Bambang Suhardito (1996) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, rasio beda hitung *difference*, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, *tax avoidance*, pendidikan, lama tinggal WP, kesadaran bernegara, pemahaman WP tentang UU, persepsi WP bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat WP terhadap beban PBB dan status rumah WP. Variabel terikat yang digunakan adalah *collection rate*. Hasil penelitian Bambang Suhardito adalah bahwa variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap *collection rate* adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan beban WP, rasio beda hitung *difference*, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP

tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, *tax avoidance*, pendidikan, dan lama tinggal WP.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Kiryanto, 2000), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) dalam Agus Budiarmanto (1999), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto, 2000). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Menurut Mardiasmo (2002), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Dalam kaitannya dengan akuntansi maka kepatuhan wajib pajak mengandung pengertian tersebut di atas.

E. Eliyani (1989) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) seperti dikutip oleh Kiryanto (2000), yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah :

1. wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
2. mengisi formulir pajak dengan benar
3. menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. membayar pajak tepat pada waktunya

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

2.1.4. Sikap Wajib Pajak

Sikap sebagai *pre disposisi* tingkah laku manusia (La Midjan, 1994), sangat dipengaruhi oleh rangsangan dan stimulus tertentu. Dapat dikatakan bahwa rangsangan diperoleh dari luar pribadi individu, kemudian akan membentuk

persepsi antara lain sebagai hasil hubungan di dalam suatu lingkungan sosial. Sikap juga merupakan hasil dari faktor genetik dan proses belajar, dan selalu berhubungan dengan suatu obyek produk.

Menurut Kotler (2000), sikap didefinisikan sebagai evaluasi yang dipertahankan seseorang mengenai suka atau tidak suka, perasaan emosi, dan kecenderungan aksi terhadap beberapa obyek atau gagasan. Loudon dan Bitta (1988) menyatakan bahwa pada garis besarnya ada empat konsep definisi tentang sikap. Definisi yang pertama menyatakan bahwa sikap adalah sejauh mana perasaan seseorang terhadap obyek, negatif atau positif, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Definisi tersebut menunjukkan sikap sebagai suatu perasaan atau reaksi penilaian terhadap suatu obyek.

Selanjutnya, Loudon dan Bitta (1988) mengemukakan pandangan yang lebih berorientasi kognitif mengenai sikap yang menyebutkan bahwa sikap adalah organisasi yang berlangsung terus menerus dari motivasi, emosi, persepsi dan proses kognitif dalam menanggapi sejumlah aspek dalam dunia individu. Definisi terakhir menyebutkan bahwa keseluruhan sikap seseorang terhadap suatu obyek dilihat sebagai fungsi kekuatan keyakinan yang dipegang seseorang terhadap bermacam-macam obyek dan evaluasi terhadap keyakinan yang berhubungan dengan obyek tersebut.

Pembahasan mengenai sikap dapat erat kaitannya dengan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga telah banyak dipelajari. Ditinjau dari segi pentingnya masalah sikap pada tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari, sikap merupakan salah

satu aspek yang mempengaruhi pola berpikir individu dalam kesehariannya terutama dalam pengambilan keputusan. Saat sikap telah terbentuk, maka sikap akan menentukan cara-cara berperilaku terhadap obyek tertentu, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sikap tersebut. Selanjutnya, sikap akan memberikan corak pada tingkah laku seseorang maupun kelompok.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan sikap wajib pajak adalah sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Sikap wajib pajak tersebut diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sikap yang dimaksud adalah sikap dalam artian positif dan kognitif.

2.1.4.1. Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Deden Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Beberapa bukti empiris seperti penelitian Bambang Suhardito (1996), Fratnesi (2001) dan Sulud Kahono (2003) telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.4.2. Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak).

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *tax payer* juga dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* (A. Tony

Prastiantono (1994). Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor *tax payer* didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak sangat dipengaruhi oleh adanya *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*.

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar WP tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa (Miando Sahala L. Panggabean, 2002).

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak (fiskus) diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Oleh karena itu sikap

wajib pajak terhadap pelayanan fiskus akan digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Beberapa temuan empiris seperti penelitian Sulud Kahono (2003) dan Suyatmin (2004) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.4.3. Sikap Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Perpajakan

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dinyatakan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib

pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kiryanto, 2000).

Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).

2.2. Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu

2.2.1. Penelitian Terdahulu

Bambang Suhardito (1996) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, rasio beda hitung *difference*, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, *tax avoidance*, pendidikan, lama tinggal WP, kesadaran bernegara, pemahaman WP tentang UU, persepsi WP bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat WP terhadap beban PBB dan status rumah WP. Variabel terikat yang digunakan

adalah *collection rate*. Hasil penelitian Bambang Suhardito adalah bahwa variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap *collection rate* adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan beban WP, rasio beda hitung *difference*, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, *tax avoidance*, pendidikan, dan lama tinggal WP.

Kiryanto (2000) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan di DIY. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kepatuhan WP. Hasil penelitian Kiryanto (2000) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP.

Fratnesi (2001) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di kota Bengkulu. Penelitian Fratnesi (2001) dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP terhadap penghindaran PBB, pendidikan WP, status tanah atau rumah WP, pendapat WP terhadap pelayanan fiskus, rasio beda hitung *difference*, pendapat WP tentang PBB dan lama tinggal WP. Variabel

terikat yang digunakan adalah *collection rate*. Hasil penelitian Fratnesi (2001) adalah bahwa kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP terhadap penghindaran PBB, pendidikan WP, status tanah atau rumah WP, dan pendapat WP terhadap pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *collection rate*.

Solich Jamin (2001) melakukan penelitian yang menganalisis perbedaan kepatuhan wajib pajak (gabungan WP badan dan WP OP) sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik uji beda dua rata-rata berpasangan (*paired sample t test*). Hasil penelitian Solich Jamin (2001) adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum krisis ekonomi dengan masa sesudah krisis ekonomi. B.M. Sitorus (2003) juga melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian Solich Jamin (2001), hanya saja B.M. Sitorus (2003) secara khusus mengkaji WP badan yang ada di KPP Jakarta Mampang Prapatan. Hasil penelitian B.M. Sitorus (2003) juga mendukung hasil penelitian Solich Jamin (2001) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum krisis ekonomi dengan masa sesudah krisis ekonomi.

Sulud Kahono (2003) melakukan penelitian tentang pengaruh dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap penghindaran PBB terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di KP PBB Semarang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian

Sulud Kahono (2003) adalah bahwa semua variabel bebas yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP PBB baik secara parsial maupun bersama-sama.

Suyatmin (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KP PBB Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Suyatmin (2004) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB baik secara parsial maupun secara simultan. Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Yang Digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Bambang Suhardito (1996)	Variabel bebas adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, rasio beda hitung <i>difference</i> , sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, <i>tax avoidance</i> , pendidikan, lama tinggal WP, kesadaran bernegara, pemahaman WP tentang UU, persepsi WP bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat WP terhadap beban PBB dan status rumah WP. Variabel terikat adalah	Regresi berganda	Variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap <i>collection rate</i> adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan beban WP, rasio beda hitung <i>difference</i> , sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, <i>tax avoidance</i> , pendidikan, dan lama tinggal WP.

		<i>collection rate</i> di Surabaya.		
2.	Kiryanto (2000)	Variabel bebas adalah lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian, sedangkan variabel terikat adalah tingkat kepatuhan WP di DIY.	Regresi berganda	Semua variabel bebas yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP.
3.	Fraternesi (2001)	Variabel bebas adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP terhadap penghindaran PBB, pendidikan WP, status tanah atau rumah WP, pendapat WP terhadap pelayanan fiskus, rasio beda hitung <i>difference</i> , pendapat WP tentang PBB dan lama tinggal WP. Variabel terikat adalah <i>collection rate</i> di Bengkulu.	Regresi berganda	Kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP terhadap penghindaran PBB, pendidikan WP, status tanah atau rumah WP, dan pendapat WP terhadap pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>collection rate</i> .
4.	Solich Jamin (2001)	Kepatuhan wajib pajak (gabungan WP badan dan WP OP) sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi di wilayah Jawa Tengah dan DIY.	Uji beda	Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum krisis ekonomi dengan masa sesudah krisis ekonomi.
5.	B.M. Sitorus (2003)	Kepatuhan wajib pajak badan sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi di KPP Jakarta Mampang Prapatan	Uji Beda	Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum krisis ekonomi dengan masa sesudah krisis ekonomi.
6.	Sulud Kahono (2003)	Variabel bebas adalah sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP	Regresi berganda	Semua variabel bebas yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP PBB baik secara parsial

		terhadap penghindaran PBB, variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak PBB di KP PBB Semarang.		maupun bersama-sama.
7.	Suyatmin (2004)	Variabel bebas adalah sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan, variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KP PBB Surakarta.	Regresi berganda	Semua variabel bebas yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP PBB baik secara parsial maupun bersama-sama.

Sumber : Penelitian terdahulu, diringkaskan.

2.2.2. Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya beberapa di antaranya menguji beda kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi untuk WP badan (B.M. Sitorus, 2003) maupun gabungan WP OP dan WP Badan (Solich Jamin, 2001). Memfokuskan analisis pada WP Pajak Bumi dan Bangunan (Sulud Kahono, 2003 dan Suyatmin, 2004) serta WP badan (Kiryanto, 2000). Belum terdapat penelitian yang secara khusus melakukan kajian terhadap wajib pajak orang pribadi (WP OP).

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dari WP OP di kota Semarang dengan menggunakan beberapa variabel seperti sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Adapun alasan pemilihan variabel dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

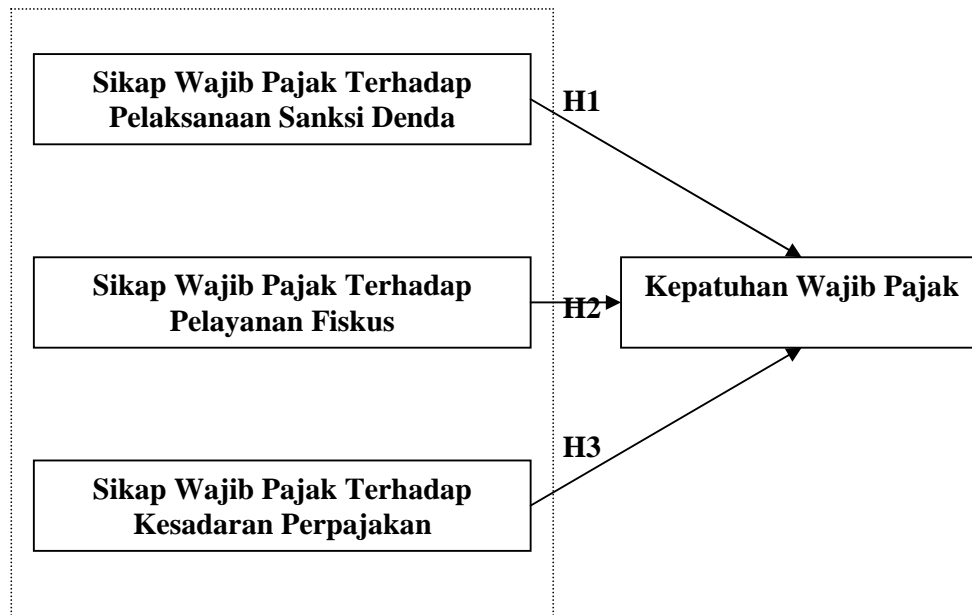
1. Variabel sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB (Sulud Kahono, 2003 dan Suyatmin, 2004). Sebagai contoh sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah dipandang kurang relevan untuk digunakan dalam penelitian WP OP karena pajak (bukan PBB) dari WP OP maupun WP Badan dikelola langsung oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah sebagaimana PBB.
2. Variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara tidak digunakan dalam penelitian ini. Alasannya adalah variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara lebih bersifat umum, dan secara khusus hal tersebut dapat dicerminkan oleh kesadaran wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan sikap wajib pajak adalah sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Sikap wajib pajak tersebut diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4. Hipotesis

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap

tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar WP tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa (Miando Sahala L. Panggabean, 2002).

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak (fiskus) diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dinyatakan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Cooper dan Emory, 1996). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para WP OP yang ada di kota Semarang. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para WP OP yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti KPP. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah WP OP efektif, terdaftar dan WP OP yang menyampaikan SPT yang diperoleh dari KPP di wilayah Semarang, peran pajak dalam APBN diperoleh dari Berita Pajak.

Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari KPP di wilayah Semarang. Sementara itu metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur

pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

Perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Tidak Pasti (TP)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Sebelum daftar pertanyaan diajukan kepada seluruh responden penelitian, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas daftar pertanyaan (uji kuesioner) dengan sampel 15 responden. Tujuan pengujian daftar pertanyaan adalah untuk menghasilkan daftar pertanyaan yang reliabel dan valid sehingga dapat secara tepat digunakan untuk menyimpulkan hipotesis. Suatu angket dikatakan reliabel jika mempunyai nilai Cronbach Alpha di atas 0,6 (Sekaran, 1992).

Sementara itu uji validitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan angket. Angket dikatakan valid akan mempunyai arti bahwa angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Syarat minimum yang harus dipenuhi agar angket dikatakan valid / sah adalah lebih besar dari 0,239 (Imam Ghozali, 2000).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kualitas-kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di kota Semarang. Berdasarkan data dari KPP yang ada di kota Semarang, hingga akhir tahun 2003 tercatat sebanyak 29.006 WP OP yang merupakan WP OP efektif. Tidak semua WP OP efektif ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *proportional sampling* untuk setiap KPP di kota Semarang (di kota Semarang terdapat 4 KPP yaitu KPP Semarang Barat, KPP Semarang Tengah, KPP Semarang Selatan dan KPP Semarang Timur). Penentuan jumlah sampel untuk pada penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan saran Roscoe (1975) dalam Sekaran (1992) yang menyatakan bahwa :

1. Jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500.
2. Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariat (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar daripada jumlah variabel bebas (minimal 10 kali).

Sementara itu Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah $4 * 20 = 80$.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Rao, 1996):

$$n = \frac{N}{1 + N (\text{moe})^2}$$

n = jumlah sampel

N = populasi

Moe = *margin of error max* yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data dari KPP yang ada di kota Semarang, hingga akhir tahun 2003 tercatat sebanyak 29.006 WP OP yang merupakan WP OP efektif. Maka jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{29006}{1 + 29006 (10 \%)^2}$$

n = 99,99

= 100

Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 WP OP. Jumlah sampel ini sudah melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Hair *et al.* (1998).

Perhitungan jumlah sampel yang diambil untuk setiap KPP berdasarkan *proportional sampling* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Perhitungan Pengambilan Sampel Untuk Setiap KPP

KPP	Jumlah WP OP Efektif	Prosentase	Jumlah Sampel
Semarang Barat	6.143	21,18%	21
Semarang Tengah	4.110	14,17%	14
Semarang Selatan	12.192	42,03%	42
Semarang Timur	6.561	22,62%	23

Sumber : KPP di wilayah Semarang

3.3. Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak, E. Eliyani (1989) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan indikator

yang diperkenalkan oleh Novak (1989) dalam Kiryanto (2000) yaitu wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin untuk 4 pertanyaan

2. Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda yaitu sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap responden dan orang lain di sekitar responden (Suyatmin, 2004). Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin untuk 4 pertanyaan yang dikembangkan oleh Sulud Kahono (2003) dan Suyatmin (2004).
3. Sikap WP terhadap pelayanan fiskus, merupakan sikap atau konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana pelayanan fiskus yang sesungguhnya terjadi (Suyatmin, 2004). Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin untuk 5 pertanyaan yang dikembangkan oleh Suyatmin (2004).
4. Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan yaitu sikap responden terhadap peranan perpajakan bagi kegiatan pembangunan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin untuk 4 pertanyaan yang digunakan oleh penelitian Suyatmin (2004) yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Pada Tabel 3.2. berikut ini dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.2.

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Notasi*	Indikator Pertanyaan	Pengukuran	Sumber
Kepatuhan WP (Patuh)	Patuh 1	➤ Secara umum dapat dikatakan bahwa anda paham dan berusaha memahami UU Perpajakan	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Novak (1989) dalam Kiryanto (2000)
	Patuh 2	➤ Anda selalu mengisi formulir pajak dengan benar		
	Patuh 3	➤ Anda selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar		
	Patuh 4	➤ Anda selalu membayar pajak tepat pada waktunya.		
Sikap WP terhadap sanksi denda (Sanksi)	Sanksi 1	➤ Anda merasa bahwa sudah sepiantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Sulud Kahono (2003) dan Suyatmin (2004)
	Sanksi2	➤ Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar		
	Sanksi3	➤ Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya		
	Sanksi4	➤ Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan		
Sikap WP terhadap pelayanan fiskus (Fiskus)	Fiskus1	➤ Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Suyatmin (2004)
	Fiskus2	➤ Dalam menentukan pajak, penetapan tarifnya telah adil		
	Fiskus3	➤ Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu		

	Fiskus4	pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku WP ➤ Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan		
	Fiskus5	➤ Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien		
Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan (Sadar)	Sadar1	➤ Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Suyatmin (2004)
	Sadar2	➤ Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah		
	Sadar3	➤ Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah		
	Sadar4	➤ Anda merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan		

Sumber : Penelitian terdahulu, diolah.

Keterangan :

* Angka dalam Notasi Variabel tidak menunjukkan peringkat

3.4. Teknik Analisis

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan

secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair *et al.*, 1998). Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Patuh} = \alpha + \beta_1 \text{Sanksi} + \beta_2 \text{Fiskus} + \beta_3 \text{Sadar} + e$$

Dimana :

Patuh	: Kepatuhan Wajib Pajak
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
Sanksi	: Sikap WP Terhadap Sanksi Denda
Fiskus	: Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus
Sadar	: Sikap WP Terhadap Kesadaran Perpajakan
e	: <i>Residual</i>

3.4.1. Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji

multikolinearitas. Namun karena data yang digunakan adalah data *cross section* maka uji autokorelasi tidak dilakukan.

3.4.1.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram *standardized residual* dan PP plot *standardized residual*. Imam Ghozali menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, apabila histogram *standardized residual* membentuk kurva normal dan PP plot *standardized residual* mendekati garis diagonal maka data terdistribusi normal.

3.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heterokedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi.

Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan uji Glejser. Dalam uji Glejser, model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel independen, bila terdapat variabel independen yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5%

terhadap residual absolut maka terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini (Gunawan Sumodiningrat, 1996).

3.4.1.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinieritas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinieritas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah.

Uji asumsi klasik seperti multikolinieritas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variable dengan menggunakan *Variance Inflating Factor (VIF)*. Batas dari *VIF* adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai *VIF* lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas. Alternatif lainnya adalah dengan melihat *condition index*, bila *condition index* lebih dari 20 maka disimpulkan terdapat multikolinieritas. Bila ada variabel independen yang terkena multikolinieritas, maka penanggulangannya salah satu variabel tersebut dikeluarkan dari model.

3.4.2. Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial, sementara uji F dilakukan untuk menguji model penelitian. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak, demikian pula sebaliknya.

Sementara itu pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden dapat dilihat melalui demografi responden. Demografi responden pada penelitian ini meliputi usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lama melakukan usaha, pengisian SPT dan pendidikan perpajakan. Jenis usaha tidak dijabarkan karena sebagian besar responden tidak mengisi kuesioner. Pada Tabel 4.1. di halaman berikut dapat dilihat ringkasan dari demografi responden.

Berdasarkan Tabel 4.1. maka dapat diketahui bahwa Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (82%), sisanya 18% berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 41 hingga 50 tahun (34%). Sementara itu sebanyak 32% responden berusia lebih dari 50 tahun, 29% antara 31 hingga 40 tahun, dan sisanya yaitu 5% berusia antara 21 hingga 30 tahun. Dilihat dari lama melakukan usaha. Sebanyak 29% responden telah melakukan usaha selama lebih dari 20 tahun, 23% responden telah melakukan usaha antara 11 sampai 15 tahun, 18% responden telah melakukan usaha selama kurang dari 5 tahun, 17% responden telah melakukan usaha antara 6 sampai 10 tahun, dan sebanyak 13% responden telah melakukan usaha antara 16 sampai 20 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA (55%). 17%

berpendidikan S1, 13% berpendidikan D3, 8% berpendidikan SMP, 3% berpendidikan S2, 3% berpendidikan SD dan 1% berpendidikan lain-lain.

Tabel 4.1.

Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis kelamin	Laki-laki	82	82%
	Perempuan	18	18%
Usia	Antara 21 th- 30 th	5	5%
	Antara 31 th- 40 th	29	29%
	Antara 41 th- 50 th	34	34%
	Diatas 51 th	32	32%
Lama Melakukan Usaha	Kurang dari 5 th	18	18%
	Antara 6 th – 10 th	17	17%
	Antara 11 th – 15 th	23	23%
	Antara 16 th – 20 th	13	13%
	Di atas 20 th	29	29%
Tingkat Pendidikan	SD	3	3%
	SMP	8	8%
	SMA	55	55%
	D3	13	13%
	S1	17	17%
	S2	3	3%
	S3	0	0
	Lainnya	1	1%
Pengisian SPT	Sendiri	67	67%
	Konsultan	26	26%
	Tenaga Ahli	7	7%
Pendidikan Perpajakan	Kursus (Brevet)	1	1%
	Pelatihan	3	3%
	Penyuluhan	52	52%
	Belajar Sendiri	44	44%

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas maka dapat diketahui bahwa untuk pengisian SPT, sebagian besar responden (67%) menyatakan bahwa mereka mengisi sendiri

SPT, 26% dibantu konsultan dan 7% menggunakan tenaga ahli. Sedangkan berdasarkan pendidikan perpajakan, sebagian besar responden (52%) menyatakan bahwa memperoleh pendidikan perpajakan melalui penyuluhan, 44% responden menyatakan bahwa mereka belajar sendiri, 3% memperolehnya melalui pelatihan, dan 1% memperolehnya melalui kursus (brevet).

4.2. Statistika Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Statistika deskriptif variabel-variabel penelitian ini ditampilkan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Pada Tabel 4.2. berikut dapat dilihat hasil ringkasan analisis statistika deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.2.

Statistika Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PATUH	100	1.00	4.25	2.9625	.62702
SANKSI	100	1.00	5.00	3.1025	.93952
FISKUS	100	1.00	4.60	2.9840	.77417
SADAR	100	1.00	5.00	2.7925	.84092
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan Tabel 4.2. di atas dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (Patuh) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,9. Ini menunjukkan bahwa

sebagian besar responden cenderung menjawab tidak pasti untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak. Nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu nilai maksimum variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,25 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda (Sanksi) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,1. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab tidak pasti untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda. Nilai minimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda adalah sebesar 1 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda. Sementara itu nilai maksimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda.

Variabel sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus (Fiskus) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,9. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab tidak pasti untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan

masalah sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Nilai minimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus adalah sebesar 1 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Sementara itu nilai maksimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus adalah sebesar 4,6 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus.

Variabel sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan (Sadar) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,79. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab tidak pasti untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Nilai minimum variabel sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan adalah sebesar 1 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Sementara itu nilai maksimum variabel sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan.

4.3. Uji Reliabilitas dan Validitas Kuesioner

Uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur. Kuesioner

dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach Alpha di atas 0,60 (Sekaran, 1992, p. 287). Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat bahwa hasil koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 untuk empat variabel penelitian yaitu variabel kepatuhan WP (Patuh) sebesar 0,8321; sikap WP terhadap sanksi denda (Sanksi) sebesar 0.7625; sikap WP terhadap pelayanan fiskus (Fiskus) sebesar 0.8362; dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan sebesar 0.6840.

Uji validitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid akan mempunyai arti bahwa angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dari hasil uji validitas item yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat hasil korelasi untuk masing-masing item dengan skor total didapat *corrected item total correlation* untuk variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 4.3. Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik, karena syarat minimum yang harus dipenuhi agar angket dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,239 (Imam Ghozali, 2000) dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket dikatakan valid. Adapun ringkasan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut ini.

Tabel 4.3.

Ringkasan Hasil Perhitungan Reliabilitas dan Validitas

Variabel	Cronbach Alpha	Indikator	<i>Corrected Item Total Correlation</i>
PATUH	0,8321	PATUH1	0,8475
		PATUH2	0,6733
		PATUH3	0,5865
		PATUH4	0,6271
SANKSI	0,7625	SANKSI1	0,7555
		SANKSI2	0,4576
		SANKSI3	0,5255
		SANKSI4	0,6744
FISKUS	0,8362	FISKUS1	0,7874
		FISKUS2	0,5489
		FISKUS3	0,4822
		FISKUS4	0,6186
		FISKUS5	0,7874
SADAR	0,6840	SADAR1	0,7767
		SADAR2	0,4637
		SADAR3	0,5268
		SADAR4	0,3653

Sumber : Data primer, diolah.

4.4. Analisis Data

4.4.1. Pengujian Asumsi Klasik

Suatu model dinyatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat *best linear unbiased estimator* (Gujarati, 1997). Di samping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi ekonometrik yang melandasinya.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji Kolmogorov Smirnov satu arah untuk menguji normalitas data secara statistik, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji

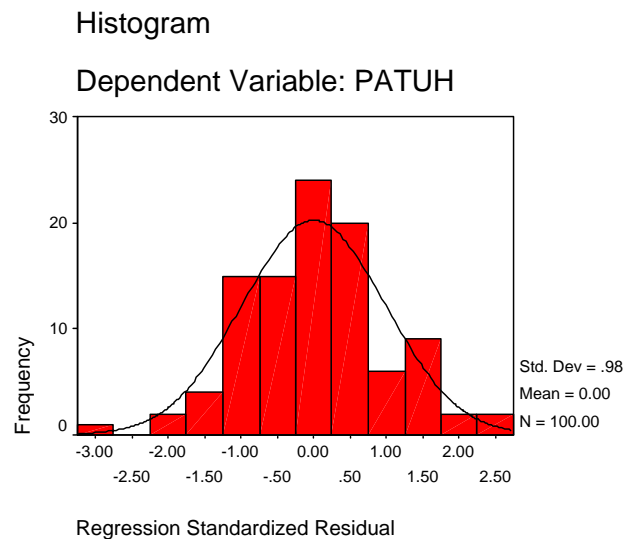
Glejser dan uji multikolinearitas dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF). Uji otokorelasi tidak dilakukan karena data yang digunakan adalah data *cross section*.

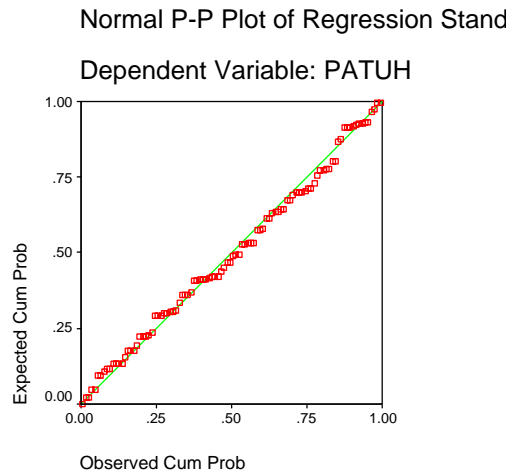
4.4.1.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram *standardized residual* dan PP plot *standardized residual*. Apabila histogram terdistribusi normal maka data dinyatakan normal, sementara itu apabila PP plot membentuk garis diagonal maka data dinyatakan normal. Pada Gambar 4.1. dan 4.2. berikut ini dapat dilihat histogram *standardized residual* dan PP plot *standardized residual*.

Gambar 4.1.

Histogram Standardized Residual



Gambar 4.2.**PP Plot *Standardized Residual***

Dari Gambar 4.1. dan 4.2. di atas dapat diketahui bahwa histogram *standardized residual* dan PP plot *standardized residual* menunjukkan pola data terdistribusi normal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

4.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (*estimator*) yang diperoleh menjadi tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar meskipun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya dan bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten). Hal ini disebabkan variansnya yang tidak minimum atau dengan kata lain tidak efisien.

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel terikatnya. Apabila hasilnya signifikan maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas (Gunawan Sumodiningrat, 1996).

Tabel 4.4.

Hasil Uji Glejser

Keterangan	t statistik	Signifikansi
SANKSI	0,182	0,856
FISKUS	0,078	0,938
SADAR	1,357	0,178

Keterangan : Variabel terikat adalah *absolute error*

Sumber : Data primer, diolah.

Dari uji Glejser seperti yang terlihat pada Tabel 4.4. diketahui bahwa semua variabel bebas yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu *absolute error* ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi dari masing-masing variabel bebas yang diteliti, di mana tingkat signifikansi dari masing-masing variabel bebas tersebut lebih besar dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi.

4.4.1.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Apabila terjadi gejala multikolinieritas, maka bisa mengakibatkan hal-hal sebagai berikut (Algifari, 1997):

1. Nilai koefisien regresi menjadi kurang dapat dipercaya.
2. Kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel-variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi. Apabila sebagian atau seluruh variabel bebas berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinieritas. Metode lain yang dapat dilakukan untuk menguji adanya multikolinieritas ini dapat dilihat pada *tolerance value* atau *Variance Inflation Factors (VIF)*. Batas *tolerance value* adalah 0,10 dan *Variance Inflation Factors (VIF)* adalah 10 (Hair *et al.*, 1998 : 48). Jika nilai *tolerance value* di bawah 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* di atas 10 maka terjadi multikolinieritas. Untuk mendeteksi multikolinieritas ini dapat pula dilihat dari *condition index*. Nilai teoritis *condition index* adalah sebesar 20, jika lebih besar dari nilai tersebut maka diindikasikan terdapat multikolinieritas.

Tabel 4.5.

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
SANKSI	0,976	1,025
FISKUS	0,992	1,008
SADAR	0,972	1,029
Condition Index : 14,610		

Sumber : Data primer, diolah.

Dari Tabel 4.5. di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance value* semua variabel berada di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* di bawah 10 serta koefisien *condition index* berada di bawah nilai 20, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda.

4.4.2. Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan kaidah dalam melakukan analisis regresi berganda sebagaimana dinyatakan oleh Gujarati (1997), bahwa suatu persamaan regresi harus memiliki data yang terdistribusi normal, bebas heteroskedastisitas, dan bebas multikolinieritas agar diperoleh persamaan regresi yang baik dan tidak bias. Dari hasil uji normalitas data yang telah dilakukan maka diketahui bahwa data yang digunakan dalam persamaan regresi ini terdistribusi secara normal, bebas heteroskedastisitas, dan tidak terdapat multikolinieritas sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi berganda dengan baik.

Untuk menjawab masalah, mencapai tujuan dan pembuktian hipotesis serta untuk mengetahui apakah variabel eksplanatori secara parsial berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel terikat, maka perlu dilakukan uji t. Hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.6. sebagai berikut:

Tabel 4.6.**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	Signifikansi
Konstanta	-0,132	0,576	0,566
SANKSI	0,305	7,890*	0,000
FISKUS	0,548	11,771*	0,000
SADAR	0,148	4,265*	0,000
Nilai F : 69,912*	R ² : 0,686		

* signifikan pada tingkat signifikansi 5%

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan Tabel 4.6. tersebut, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Patuh} = -0,132 + 0,305\text{Sanksi} + 0,548\text{Fiskus} + 0,148\text{Sadar} + e$$

Penjelasan mengenai analisis pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan di bagian selanjutnya.

4.4.2.1. Pembahasan Hipotesis 1

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap WP terhadap sanksi denda (Sanksi) memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,305. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap WP terhadap sanksi denda (Sanksi) terhadap variabel kepatuhan WP (Patuh) adalah positif. Nilai t hitung variabel bebas sikap WP terhadap sanksi denda (Sanksi) adalah sebesar 7,890 yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat bebas (df) sebesar 99 pada tingkat signifikansi 5% sebesar 1,96. Berdasarkan hal tersebut maka H1

yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab tidak pasti untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan variabel bebas sikap WP terhadap sanksi denda (Sanksi). Hal ini dapat terjadi karena responden ragu-ragu untuk memberikan jawaban yang tegas mengenai penerapan sanksi denda. Meskipun demikian sikap WP terhadap sanksi denda ini masih dapat ditingkatkan agar tingkat kepatuhan WP makin tinggi lagi. Statistika deskriptif item-item pertanyaan variabel sanksi dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Pertanyaan pertama dalam variabel Sanksi ini adalah “Anda merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,3 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab tidak pasti untuk pertanyaan ini, meskipun demikian angka ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju. Pertanyaan kedua adalah “Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2,96 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju,

sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan ketiga adalah “Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,15 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan keempat adalah “Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,00 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.7.

Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Sanksi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SANKSI1	100	1.00	5.00	3.3000	1.20185
SANKSI2	100	1.00	5.00	2.9600	1.24657
SANKSI3	100	1.00	5.00	3.1500	1.18386
SANKSI4	100	1.00	5.00	3.0000	1.17207
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer, diolah.

Fratnesi (2001) menyatakan bahwa WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila di dalam penelitian ini ditemukan makin positif sikap wajib pajak terhadap sanksi denda maka akan makin meningkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian Bambang Suhardito (1996), Fratnesi (2001) dan Sulud Kahono (2003) yang juga menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2.2. Pembahasan Hipotesis 2

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap WP terhadap pelayanan fiskus (Fiskus) memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,548. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap WP terhadap pelayanan fiskus (Fiskus) terhadap variabel kepatuhan WP (Patuh) adalah positif.

Nilai t hitung variabel bebas sikap WP terhadap pelayanan fiskus (Fiskus) adalah sebesar 11,771 yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat bebas (df) sebesar 99 pada tingkat signifikansi 5% sebesar 1,96.

Berdasarkan hal tersebut maka H2 yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Sulud Kahono (2003) dan Suyatmin (2004) yang juga menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga mendukung pernyataan dari Miando Sahala L. Panggabean (2002) yang menyatakan bahwa kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa masih dimungkinkan untuk dilakukan peningkatan pelayanan fiskus karena kebanyakan responden menjawab tidak pasti untuk item-item pertanyaan yang berkaitan dengan variabel bebas sikap WP terhadap pelayanan fiskus (Fiskus) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.8. berikut ini.

Tabel 4.8.**Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Fiskus**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FISKUS1	100	1.00	5.00	2.9800	1.04427
FISKUS2	100	1.00	5.00	2.9500	.97830
FISKUS3	100	1.00	5.00	3.1300	1.08855
FISKUS4	100	1.00	5.00	3.0400	1.00423
FISKUS5	100	1.00	5.00	2.8200	1.12259
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer, diolah.

Variabel Fiskus ini dibentuk dari 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah “Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2,98 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan kedua adalah “Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2,95 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan ketiga adalah “Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda

selaku WP”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,13 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan keempat adalah “Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,04 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan kelima adalah “Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien“. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2,82 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

4.4.2.3. Pembahasan Hipotesis 3

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap WP terhadap kesadaran perpajakan (Sadar) memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,184. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap WP terhadap kesadaran perpajakan (Sadar) terhadap variabel kepatuhan WP (Patuh) adalah positif. Nilai t hitung variabel bebas sikap WP terhadap kesadaran perpajakan (Sadar) adalah sebesar 4,265 yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat bebas (df) sebesar 99 pada tingkat signifikansi 5% sebesar 1,96. Berdasarkan hal tersebut maka H3 yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Sementara itu kebanyakan responden penelitian menjawab tidak pasti untuk item-item pertanyaan dalam variabel bebas sadar, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki kesadaran perpajakan yang tidak pasti. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dapat lebih ditingkatkan lagi agar kepatuhan wajib pajak dapat lebih tinggi.

Ada empat indikator yang digunakan untuk variabel Sadar. Pertanyaan pertama adalah “ Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2,7 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini

adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan kedua adalah “Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2,89 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan ketiga adalah “Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2,68 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan keempat adalah “Anda merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan” . Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2,90 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju,

sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Tabel 4.9.

Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel Sadar

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SADAR1	100	1.00	5.00	2.7000	1.29099
SADAR2	100	1.00	5.00	2.8900	1.10000
SADAR3	100	1.00	5.00	2.6800	1.19663
SADAR4	100	1.00	5.00	2.9000	1.12367
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer, diolah.

Penelitian Suyatmin (2004) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.4.3. Pengujian Kelayakan Model

Persamaan regresi memiliki nilai F hitung sebesar 69,912 yang lebih besar daripada F tabel dengan derajat bebas (3 : 96) pada tingkat signifikansi 5% sebesar 2,60. Artinya adalah persamaan regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi hingga 5%. Ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam

penelitian ini merupakan penjas nyata pada variabel terikat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak untuk digunakan. Sementara itu kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 68,6%, sementara 31,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian ini :

1. Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan WP.
2. Sikap WP terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan WP.
3. Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan WP.
4. Kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 68,6%, sementara 31,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini.

5.2. Saran

Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Sanksi denda harus disosialisasikan dengan baik kepada para WP agar WP dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap WP. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para WP baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi denda.
2. Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para WP dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan WP agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi WP. Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya.
3. Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan. Hal ini dapat dilakukan pula dengan sosialisasi di profesi-profesi tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional tertentu.
4. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal

ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarmanto (1999), *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Algifari (1997), *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi*, BPFE, Yogyakarta.
- A. Tony Prasetyantono (1994), *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia*, Penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bamber (1993), "Opportunities in Behavioral Accounting Research," *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 5, p. 1 – 29.
- B.M. Sitorus (2003), *Analisis Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Bruce, Donald (2002), "Taxes and Entrepreneurial Endurance : Evidence From the Self-Employed," *National Tax Journal*, Vol. LV No. 1, p. 5 – 24.
- Deden Saefudin (2003), "Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak," *Berita Pajak*, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28.
- Direktorat Jenderal Perpajakan, *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003.
- Feinstein, J.S. (1991), "An Econometrics Analysis of Income Tax Evasion and Its Detection," *RAND Journal of Economics*, Vol. 22 No. 1, p. 14 – 35.
- Franzoni, Luigi A. (1998), "Tax Evasion and Tax Compliance," *Encyclopaedia of Law and Economics*, B. Bouckaert and G. de Geest, eds., Edward Elgar and University of Ghent.
- Fratrnesi (2001), *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Forest, Steven. M. (2002), "Complexity and Compliance : An Empirical Investigation," *National Tax Journal*, Vol. LV No. 1, p. 75 – 88.
- Greene, William H. (1997), *Econometric Analysis*, Mac Millan Publishing Company, New York.

- Guerth, Werner dan Rupert Sausgruber (2004), "Tax Morale and Optimal Taxation," *CESifo Working Paper*, Presented at CESifo Venice Summer Institute.
- Gujarati, D.N. (1995), *Basic Econometric*, 3rd Edition, McGraw Hill, Inc.
- Gunawan Sumodiningrat (1996), *Ekonometrika Pengantar*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hair, Joseph F, Ralph E. Anderson, Ronald L. Tatham, dan William C. Black (1998), *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc.
- Harry Yusuf A. Laksana (2001), "Special Tax Investigation dan Implikasinya Terhadap Etika Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya," *Berita Pajak*, No. 1450/Tahun XXXIV, p. 47 – 48.
- H. Mughtar Tumin (2001), "Akuntabilitas DJP di Mata Publik," *Berita Pajak*, No. 1439/Tahun XXXIII., p. 32 – 35.
- Imam Ghozali (2001), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kiryanto (2000), "Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya," *EKOBIS*, Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52.
- La Midjan (1994), *Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Pimpinan Puncak dan Kepala Bagian Akuntansi Perusahaan Go Public*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Padjajaran Bandung.
- Lederman, Leandra (2004), "Tax Compliance and the Reformed IRS," *Working Paper*, George Mason University School of Law.
- Lerche, Dietrich (1980), "Efficiency of Taxation in Indonesia," *BIES*, Vol. 16 No. 1, p. 34 – 51.
- Miando Sahala H. Panggabean (2002), "Self Assessment, Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Berita Pajak*, No. 1462/Tahun XXXIV, p. 31 – 33.
- M. Said (2003), "Fenomena Pajak," *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV, p. 21 – 26.
- Murdiasmo (2002), *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.

- Novak, Norma D. (1989), *Tax Administration in Theory and Practice*, Preager Publisher, London.
- Pruzhansky, Vitaly (2004), "Honesty in A Signaling Model of Tax Evasion," *Tinbergen Institute Discussion Paper*, Department of Economics, Vrije Universiteit Amsterdam.
- Riahi-Belkaoui, Ahmed (2004), "Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale," *Working Paper*, University of Illinois at Chicago.
- Robbins, Stephen P. (1996) *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Prenhallindo, Jakarta.
- Rochmat Soemitro (1998), *Azas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama.
- Sekaran, Uma (1992), *Research Methods For Business: Skill-Building Approach*, 2nd Editon, John Wiley & Sons, Inc.
- Soemarso S.R. (1998), "Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia," *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia*, Vol. XLVI No. 3, p. 333 – 368.
- Solich Jamin (2001), *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Pada KPP di Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Sulud Kahono (2003), *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Sumihar Petrus Tambunan (2003), "Mengapa Kita Membayar Pajak," *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV, p. 33 – 35.
- Suyatmin (2004), *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Yanif, Gideon (1999), "Tax Compliance and Advanced Tax Payment : A Prospect Theory Analysis," *National Tax Journal*, Vol. LII No. 4., p. 753 – 764.